

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Meskipun pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menunjukkan nilai yang positif, akan tetapi pertumbuhannya rata-rata per tahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang pernah dicapai pada saat sebelum terjadinya krisis ekonomi, khususnya pada periode 1980-an hingga pertengahan 1990-an (Tulus Tambunan : 2009). Salah satu penyebabnya adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar negeri maupun dalam negeri terutama dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN). Padahal saat sebelum terjadinya krisis ekonomi kegiatan investasi, khususnya PMDN, merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama melihat kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia sebagian besar karena kehadiran PMDN itu sendiri.

Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Undang-undang tersebut kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan UU No.12/Tahun 1970. Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-

hentinya dilakukan pemerintah, terutama sejak awal pelita IV atau tepatnya tahun 1984. Hingga kini undang-undang penanaman modal mengalami pembaharuan yaitu dengan adanya UU no.25 tahun 2007. Melalui berbagai paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan tata cara impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi, serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu.

Semenjak ditetapkannya Undang-Undang No. 12/Tahun 1970 tentang PMDN, kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka, terutama bagi penanam modal asing. Bahkan investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun.

Penanaman modal oleh dunia usaha meningkat pesat terutama dalam dasawarsa 1980-an sesudah pemerintah meluncurkan sejumlah paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Dalam dasawarsa 1970-an bagian terbesar dari penanaman modal dalam negeri berasal dari sektor pemerintah. Keadaan tersebut sekarang telah berbalik. Selama paruh pertama dasawarsa 1990-an sebagian besar investasi domestik berasal dari dunia usaha dan masyarakat. Investasi oleh pemerintah sendiri juga tetap bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana serta pelayanan dasar lainnya.

Dilihat dari periode sebelum dan sesudah krisis moneter peran investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan di tahun – tahun tertentu.

Tabel 1.1
Perkembangan realisasi PMDN di Indonesia
Periode 1985-2008 (Miliar Rupiah)

Tahun	PMDN			PMA		
	Proyek	Nilai	%	Proyek	Nilai	%
1985	367	38302.7	-	46	145.7	-
1986	217	41258.4	7.72	26	800.7	449.55
1987	510	11404.1	-72.36	51	1239.7	54.83
1988	806	15680.9	37.50	129	4425.9	257.01
1989	777	21907	39.70	295	5920.2	33.76
1990	1329	59878.4	173.33	432	8750.1	47.80
1991	804	41084.8	-31.39	376	8778.2	0.32
1992	436	29341.7	-28.58	305	10313.2	17.49
1993	548	39450.4	-34.45	329	8144.2	-21.03
1994	823	53289.1	35.08	449	23724.3	191.30
1995	775	69853	31.08	499	23742.3	0.08
1996	810	100715	44.18	799	39914.7	68.12
1997	718	119873	19.02	790	33832.5	-15.24
1998	1035	13563.1	-88.69	959	29931.4	-11.53
1999	237	53550	294.82	1164	10890.6	-63.61
2000	190	17496.5	-67.33	789	6087	-44.11
2001	264	58816	236.16	1333	15055.9	147.35
2002	184	25307.6	-56.97	1141	9789.1	-34.98
2003	181	48484.8	91.58	1024	13207.2	34.92
2004	178	37140.4	-23.40	1190	10279.8	-22.17
2005	214	30665	-17.43	908	8916.9	-13.26
2006	164	20788.4	-32.21	867	5977	-32.97
2007	159	34878.7	67.78	982	10341.4	73.02
2008	239	20363.4	-41.62	1138	14871.4	43.80
jumlah	11965	949542		16021	305079	
rata-rata	498.54	41284.5		667.54	12711.6	

Sumber: Biro Pusat Statistik (data diolah)

Nilai PMDN di Indonesia Periode 1985-2008 sebesar 57769106.4 miliar rupiah, rata-rata per tahun sebesar 2511700.28 miliar rupiah, Sedangkan nilai PMA di Indonesia Periode 1985-2008 sebesar 305079.40 miliar rupiah, rata-rata per tahun sebesar 12711.64 miliar rupiah. Perkembangan PMDN sebelum krisis ekonomi yaitu dari tahun 1985-1997 menunjukkan bahwa baik dari segi proyek maupun nilainya, proporsi PMDN jauh lebih besar dari pada perkembangan PMA di Indonesia.

Hal ini dikarenakan pada saat itu Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah sangat gencar untuk terus meningkatkan investasi, terutama yang berasal dari para investor dalam negeri. Akan tetapi, pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 sampai tahun 2008 justru sebaliknya, dimana baik proyek maupun nilai dari PMDN selalu lebih rendah dari PMA. Perbandingan perkembangan PMDN dan PMA sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 1997/1998 dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan 1.3.

Perkembangan PMDN di Indonesia periode 1985-1997 yaitu nilai PMDN sebesar Rp 57461602.5 miliar dengan rata-rata nilai setiap tahunnya sebesar Rp 4420123.27 miliar. Sedangkan untuk perkembangan PMA di Indonesia periode 1985-1997 yaitu nilai PMA sebesar Rp 169731.7 miliar dengan nilai rata-rata nilai setiap tahunnya sebesar Rp 13056.29 miliar. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan PMDN di Indonesia periode 1985-1997 lebih besar dari PMA. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PMDN pada masa era Orde Baru jauh lebih baik daripada pasca-krisis ekonomi 1997/1998, kondisi ini didukung oleh

stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia yang baik dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 6,5%. (NK dan APBN, 1980-1996: 112-150). Hal ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan PELITA IV yang mendorong pemerintah dan publik untuk melakukan investasi.

Tabel 1.2
Perbandingan Perkembangan realisasi PMDN dan PMA Sebelum Krisis 1997/1998 (Miliar Rupiah)

Tahun	PMDN		PMA	
	proyek	nilai	proyek	nilai
1985	367	38302.72	46	145.7
1986	217	41258.36	26	800.7
1987	510	11404.05	51	1239.7
1988	806	15680.94	129	4425.9
1989	777	21907.01	295	5920.2
1990	1329	59878.4	432	8750.1
1991	804	41084.8	376	8778.2
1992	436	29341.7	305	10313.2
1993	548	39450.4	329	8144.2
1994	823	53289.1	449	23724.3
1995	775	69853	499	23742.3
1996	810	100715.2	799	39914.7
1997	718	119872.9	790	33832.5
jumlah	8920	642038.59	4526	169731.7
rata-rata	686.15	49387.58	348.15	13056.29

Sumber: BKPM dan BPS (data diolah)

Perkembangan PMDN di Indonesia sejak krisis menunjukkan keadaan yang bertolak belakang dengan keadaan sebelum krisis, dimana perkembangan PMDN lebih rendah daripada PMA, baik dalam jumlah proyek maupun nilai investasinya. Data menunjukkan bahwa perkembangan PMDN periode 1998-2008 tercatat nilai PMDN sebesar Rp 307503.9 miliar dengan rata-rata nilai setiap tahunnya sebesar Rp 30750.39 miliar. Sedangkan untuk perkembangan PMA di

Indonesia periode 1998-2008 yaitu nilai PMA sebesar Rp 135347.7 miliar dengan nilai rata-rata nilai setiap tahunnya sebesar Rp 12304.336 miliar.

Tabel 1.3
Perbandingan Perkembangan PMDN dan PMA Sejak Krisis 1997/1998
(Miliar Rupiah)

Tahun	PMDN		PMA	
	proyek	nilai	proyek	nilai
1998	1035	13563.1	959	29931.4
1999	237	53.550.0	1164	10890.6
2000	190	17496.5	789	6087
2001	264	58816	1333	15055.9
2002	184	25307.6	1141	9789.1
2003	181	48484.8	1024	13207.2
2004	178	37140.4	1190	10279.8
2005	214	30665	908	8916.9
2006	164	20788.4	867	5977
2007	159	34878.7	982	10341.4
2008	239	20363.4	1138	14871.4
jumlah	3045	307503.9	11495	135347.7
rata-rata	276.81818	30750.39	1045	12304.336

Sumber: BKPM dan BPS (data diolah)

Perkembangan PMDN yang lebih rendah dari PMA disebabkan karena inefesiensinya tiap proyek yang dikembangkan untuk setiap kegiatan investasi. Jika dalam satu proyek PMDN memerlukan rata-rata nilai sebesar 82.81%, berbeda dengan proyek PMA dimana dalam rata-rata tiap proyeknya hanya perlu menggunakan 19.04%. ini membuktikan bahwa investasi dalam negeri kurang efisien dibandingkan dengan PMA.

Selain itu juga rendahnya nilai PMDN disebabkan oleh keadaan fundamental ekonomi yang kurang stabil. Dimana akibat krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan banyak pengusaha yang memilih untuk menutup sementara usahanya bahkan banyak juga yang mengalami gulung tikar (bangkrut).

Hal ini jelas sangat mempengaruhi perkembangan PMDN karena para pengusaha kurang memiliki modal untuk menginvestasikan di beberapa sektor ekonomi di Indonesia. Keadaan ini menjadi kesempatan baik bagi para penanam modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Walaupun kegiatan investasi asing ini akan membawa pengaruh yang positif terhadap perekonomian nasional, karena disamping akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengeksplorasi sumber daya alam guna kemakmuran rakyat juga akan memperluas peluang pekerjaan dan meningkatkan penerimaan pajak, dan sebagainya. Tetapi, apabila jumlahnya lebih besar daripada PMDN dikhawatirkan seluruh SDA yang dimiliki Indonesia akan dieksploitasi oleh pihak asing dan keuntungan yang besar akan semakin dikeruk oleh pihak asing.

Perkembangan PMDN yang lebih rendah dari PMA pasca krisis dipengaruhi oleh buruknya iklim investasi di Indonesia. Berkaitan dengan persoalan internal Indonesia, ada beberapa faktor negatif yang berpengaruh pada iklim investasi meliputi: Prosedur perijinan yang masih berlaku dan relatif mahal, tingkat kepastian hukum yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur, kurangnya insentif yang bersaing yang diberikan kepada para calon investor. Sehingga, laju kegiatan investasi tidak berjalan dengan baik selama ini karena iklim investasinya memang tidak mendukung.

Pada saat Indonesia terpuruk yaitu ketika dilanda krisis ekonomi pada pertengahan Juli 1997, tingkat pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan

menjadi 4% yang tahun sebelumnya 7%, kemudian makin terpuruk hingga pertumbuhan ekonomi mencapai minus 13%.

Tabel 1.2 Laju pertumbuhan ekonomi

Tahun	PDB (juta Rp)	LPE (%)
1995	1,301,510.64	8.22
1996	1,411,923.03	7.82
1997	1,481,556.17	4.70
1998	1,309,606.03	-13.13
1999	1,333,067.01	1.76
2000	1,389,769.60	4.08

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, BI, data diolah

Dari tahun 1995-1997 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan meskipun kenaikan pada PDB tidak terlalu besar. Pada tahun 1998 PDB Indonesia mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu -13.13%, hal ini disebabkan karena krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, sehingga membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 1998. Selain penurunan pada PDB Indonesia, inflasi di tahun 1998 juga sangat tinggi hingga mencapai 77.60%, nilai ekspor menurun -13%, nilai impor -30%, dan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Stabilitas perekonomian nasional terganggu, tingkat inflasi tinggi, penurunan pendapatan nasional serta pertahanan dan keamanan nasional yang tidak stabil, mengakibatkan penanaman modal dalam negeri juga mengalami penurunan.

Krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan Juli 1997 merupakan krisis terburuk sejak pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan hiperinflasi (sekitar 80%), pertumbuhan ekonomi mengalami

kontraksi yang sangat besar (15%) dengan pengangguran mencapai 11,8 juta orang, kemiskinan meningkat dari 11,3% jumlah penduduk tahun 1996 menjadi 39,1% (79,4 juta pada pertengahan 1998) dan pendapatan per kapita merosot dari \$ 1.055,4 menjadi \$ 449,2 tahun 1998.⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, krisis berkembang meluas menjadi krisis sosial dan politik yang disertai dengan hilangnya kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.

Upaya untuk mengintensifkan kegiatan investasi terutama dalam bentuk PMDN menjadi tugas yang penting bagi para pelaku ekonomi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian. Hal ini menjadi tantangan bagi pemimpin-pemimpin politik, institusi pemerintahan dan hukum, untuk mencari strategi dan memberikan aturan yang baik untuk menarik investasi sehingga dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Rendahnya dan buruknya iklim investasi dan perkembangan PMDN di Indonesia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, yaitu menyebabkan rendahnya pendapatan nasional yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi; menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan atau rendahnya pendapatan, pada akhirnya akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Jika masalah ini dibiarkan kondisi perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk. Untuk menanggulangi masalah ini perlu dicari alternatif pemecahannya. Maka penulis dalam penelitian ini akan mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI INDONESIA PERIODE 1985-2008”**

2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ditekankan adalah karena kecenderungan investasi dalam negeri yang berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2008.

Oleh karena itu, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat suku bunga terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008?
3. Bagaimanakah pengaruh infrastruktur terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008?
4. Bagaimanakah pengaruh krisis ekonomi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008?
5. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga , infrastruktur dan krisis ekonomi terhadap PMDN di Indonesia?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008

3. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008.
4. Untuk mengetahui pengaruh krisis ekonomi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia periode 1985-2008
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga dan infrastruktur serta krisis ekonomi terhadap PMDN di Indonesia periode 1985-2008.

3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1). Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah PMDN di Indonesia.

2). Secara Praktis

- a. Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, infrastruktur dan krisis ekonomi terhadap perkembangan PMDN di Indonesia.
- b. Untuk memberikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan, baik itu menteri keuangan ataupun lembaga-lembaga penanaman modal seperti BKPM.